



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DISPERMADES KABUPATEN BATANG



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BATANG
JL. RA. KARTINI NO. 1 BATANG 51215 Telp. (0285) 391428**

KATA PENGANTAR

Atas limpahan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua sehingga Penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan disusunnya Rancangan Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Rancangan Kerja Dispermades Kabupaten Batang yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD serta Tujuan dan Sasaran Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Renja ini.

Kami beerharap semoga Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran dan konstribusi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024

Batang, 21 Juni 2023
KEPALA DISPERMADES
KABUPATEN BATANG


Drs. RUSMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730720 199303 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 5

 1.3. Maksud dan Tujuan 7

 1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT (RENJA PD)

 TAHUN LALU 9

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Daerah sampai dengan Tahun 2022..... 9

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 20

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispermades Kabupaten Batan 24

 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 25

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERMADES

 3.1 Program dan Kegiatan 38

BAB IV PENUTUP. 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Batang dipimpin oleh Penjabat Bupati Batang sejak bulan Mei 2023, dimana sebagai pedoman Penjabat Bupati untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026 maka telah disusun Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dan telah ditetapkan dalam PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2026. Hal ini sebagai pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 yaitu bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah karena masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau 2023 maka dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan

rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD diinstruksikan khususnya kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja (Renja) periode 2023-2026.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun selaras dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 guna mendukung terwujudnya salah satu Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu :

Tujuan : “ Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel”.

Sasaran : “ Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ” dan “ Meningkatnya kualitas pelayanan public melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsive (agile governance)”.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Tata cara penyusunan Renja sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja (pasal 125) , meliputi :
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD (Pasal 126-130), meliputi :

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja pada minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan Renja PD (Pasal 131-135) :
 - a. Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD setelah dilakukan review oleh Tim RKPD
 - b. Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
 - c. Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk

diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Pasal 136-137)

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Pasal 138)

Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja

6. Penetapan Renja Perangkat Daerah (Pasal 139-143)

- a. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi
- b. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
- c. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- d. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
- e. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berdasarkan tata cara penyusunan Renja di atas , dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 yang disusun ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 dan selanjutnya Rencana Kerja Anggaran Perangkat

Daerah (RKAPD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 6 Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 tahun 2007 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2007 Nomor 13 seri E nomor 7);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2019 Nomor 13);
 - n. Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 115);
 - o. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);
 - p. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 16);
 - q. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 36).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah :

- a. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Dispermades Kabupaten Batang;
- b. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Dispermades Kabupaten Batang.
- c. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dispermades Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah :

- a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023;
- b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023;
- c. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023.
- d. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang efektif dan efisien.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2022

1.1 Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dispermades, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen perangkat daerah, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dispermades Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2022.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dispermades Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dispermades Tahun 2022

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun 2023 dan Capaian Renstra Dispermades sampai dengan tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispermades

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan indikator kerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
5. Formulasi dan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan..

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Batang

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan sesuai yang tertuang dalam usulan Renstra 2023-2026.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dispermades Sampai dengan Tahun 2022

Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta bidang pelaksana.

Penyusunan Renja Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Keberhasilan suatu proses perencanaan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan

yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Dispermades Kabupaten Batang yang ditunjang dengan Anggaran. Total Pagu Anggaran Belanja APBD Tahun 2022 Dispermades Kabupaten Batang sebagai berikut:

Pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 45.894.676.018 terealisasi sebesar Rp. 41.191.066.064 atau sebesar 97,25 % dengan jumlah program pada DPPA sebanyak 4 Program, 9 Kegiatan dengan 29 Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah program dan kegiatan pada Renstra 2017 – 2022 adalah sebanyak 13 program , 67 kegiatan, pada Renja tahun 2021 adalah sebanyak 3 program , 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan karena adanya perubahan peraturan yang baru Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sehingga program dan kegiatan yang ada pada Renstra namun tidak terakomodir dalam DPA.

Realisasi keuangan dan capaian kinerja fisik kegiatan Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Fisik
Dispermades Kabupaten Batang
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Efisiensi	%
		Target	Realisasi		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	42.355.900.146	41.191.066.064	1.164.834.082	97,25
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.708.973.966	2.514.299.064	194.674.902	92,81
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.365.000	4.344.000	21.000	99,52
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.365.000	4.344.000	21.000	99,52
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.503.003.216	2.316.002.607	187.000.609	92,53
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.450.214.016	2.263.213.407	187.000.609	92,37
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.789.200	52.789.200	-	100,00
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.202.450	51.247.525	4.954.925	91,18
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.039.000	2.006.500	32.500	98,41

b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.988.450	14.957.450	31.000	99,79
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	6.440.000	1.060.000	85,87
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.575.000	9.575.000	-	100,00
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000	2.010.000	90.000	95,71
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	16.258.575	3.741.425	81,29
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.560.000	91.031.905	2.528.095	97,30
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	-	100,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.460.000	34.476.405	983.595	97,23
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.600.000	56.055.500	1.544.500	97,32
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.843.300	51.673.027	170.273	99,67
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.581.300	35.487.319	93.981	99,74
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.560.000	2.525.000	35.000	98,63
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.702.000	13.660.708	41.292	99,70
2.	Program Penataan Desa	44.661.050	44.601.550	59.500	99,87
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	44.661.050	44.601.550	59.500	99,87
a	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota - Fasilitasi Peraturan Bupati Batang Tentang LKD dan LAD	44.661.050	44.601.550	59.500	99,87
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	36.227.763.930	35.319.832.18	907.931.802	97,49
3.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	36.227.763.930	35.319.832.18	907.931.802	97,49
e	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	25.000.000	25.000.000	-	100,00
b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	160.027.400	147.833.879	12.193.521	92,38
c	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	23.810.000	22.743.895	1.066.105	95,52
d	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	77.454.400	18.763.800	58.690.600	24,23

e	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40.000.000	4.620.850	35.379.150	11,55
f	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	10.000.000	7.500.000	2.500.000	75,00
g	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	35.824.528.480	35.028.759.125	795.769.355	97,78
h	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	66.943.650	64.610.579	2.333.071	96,51
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.419.162.250	3.356.934.872	62.227.378	98,18
4.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah bupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.419.162.250	3.356.934.872	62.227.378	98,18
a	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50.998.000	50.998.000	-	100,00
b	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel. dan Masyarakat Hukum Adat	896.938.250	866.302.450	30.635.800	96,58
c	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.756.261.000	1.755.530.650	730.350	99,96
e	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	85.000.000	84.979.267	20.733	99,98
f	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	629.965.000	599.124.505	30.840.495	95,10

Tabel 2.1.b

Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial
Dispermades Kab. Batang Tahun 2022

Bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial kepada pemerintah desa baik bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten adalah sebesar Rp. **37.719.242.300** dapat terealisasi sebesar Rp. **37.719.242.300** atau sebesar 100 %.

Adapun rincian bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dispermades sebagai berikut:

No.	Bantuan Langsung Masyarakat	Anggaran	Realisasi	%
A.	BELANJA HIBAH	175.000.000	175.000.000	100
1.	Hibah Kemasyarakatan	175.000.000	175.000.000	100
B.	BELANJA BANSOS	304.920.000	349.950.000	100
1.	PMT-AS	259.920.000	259.920.000	100
2.	PMT Posyandu	45.000.000	45.000.000	100
C.	Bankeu kepada Desa	37.239.322.300	37.239.322.300	100
1.	Bantuan Khusus Kepada Kepala Desa	1.700.000.000	1.700.000.000	100
2.	Bankeu Khusus Sarpras Desa	33.789.322.300	33.789.322.300	100
3.	TMMD, Pendamping TMMD, Karya Bhakti TNI	1.750.000.000	1.750.000.000	100
	TOTAL BLM	37.719.242.300	37.719.242.300	100

Sumber: APBD Kab. Batang TA 2022

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang tahun 2022 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel **2.1.b. (T-C 29)** di bawah ini :

:

Tabel 2.1.b T.C 29
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
 Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022

Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n-3 (s.d Tahun 2022)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10=5+7+9	11=10/4
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	16 laporan	97,25
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	jumlah pelayanan administrasi yang tersedia	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	16 laporan	92,81
2	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah.	persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	16 laporan	99,52

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	16 laporan	99,52
			Administrasi Keuangan Perangkat Desa		72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	16 laporan	92,53
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	16 laporan	92,37
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	16 laporan	100,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	16 laporan	91,18
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan yang tersedia	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	98,41
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	99,79
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	85,87
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	100,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	95,71
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terfasilitasi	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	81,29
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya urusan Jasa pelayanan	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	97,30
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	jumlah materai yang tersedia	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	100,00

				Dinas Operasional atau Lapangan									
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	97,23
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang tersedia	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	97,32
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									99,67
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pajak kendaraan dinas / operasional yang terbayarkan	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	99,74
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	98,63
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	99,70
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	97,49
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	97,49
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi Penyelenggaraan Adm. Pemerintahan desa	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	100,00
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan desa	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	92,38

			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	jumlah BUMDes yang mendapat pembinaan	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	95,52
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang terisi Kepala Desa	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	24,23
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yg difasilitasi dalam pengisian perangkat Desa	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	11,55
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg mendapat fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	75,00
			Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	jumlah desa yg Mendapatkan bantuan keuangan	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	97,78
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terciptanya Desa & kelurahan yang tertib Administrsi	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	96,51
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	98,18
			<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat</i>	Jumlah LKD yang aktif dalam pemberdayaan desa	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	100	239 desa	239 desa	98,18

				yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LKD yang dibina	6 Desa	2 Desa	1 Desa	1 Desa	100	1 Desa	4 Desa	100,00
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapat bantuan sarana prasarana	6 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	4 Kali	96,58
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksannya Fasilitasi Pengembangan UKM dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	72Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	100	12 Kelompok	48 Kelompok	99,96
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terfasilitasi Jumlah desa yang mendapat Pemanfaatanbantuan TTG	6 kelompok	2 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	100	1 kelompok	4 kelompok	99,98
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasi nya jumlah PKK desa yang aktif	4 Pokja 1 Sekretariat	4 Pokja 1 Sekretariat	4 Pokja 1 Sekretariat	4 Pokja 1 Sekretariat	100	4 Pokja 1 Sekretariat	4 Pokja 1 Sekretariat	95,10

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa realisasi program/kegiatan hampir semua target terpenuhi, hal ini didukung adanya komitmen bersama untuk senantiasa meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di Dispermades agar tercapai pelayanan yang terus meningkat tiap tahun.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dispermades Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas
2. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelayanan
3. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur

Dari identifikasi terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dispermades Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dispermades Kabupaten Batang Realisasi Capaian Tahun 2022 , dari 7 (tujuh) indikator, seluruhnya telah memenuhi target tahun 2021, antara lain: Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sejumlah 6 kelompok, Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebesar 68%, LPM Berprestasi sebesar 41 %, PKK aktif dan Posyandu aktif keduanya berhasil mencapai target sebesar 100%, Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sebesar 10 %, dan kapasitas aparatur pemerintah desa sebesar 70 %.

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Batang terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dispermades meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas aparatur Dispermades melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan daerah;
3. Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di setiap level pemerintahan secara berjenjang dari bawah ke atas;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Untuk lebih jelasnya, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dispermades Kabupaten Batang Realisasi Capaian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 (TC-30)
 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Dispermades Kabupaten Batang
 Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	Tahun n -2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kel	6	6	6		6	6	6		
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	68	68	68		68	68	68		
3.	LPM Berprestasi	%	3,3	4,1	4,1		4,1	4,1	4,1		
4.	PKK Aktif	%	100	100	100		100	100	100		
5.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	8	9	10		9	9	9		
6.	Kapasitas aparatur Pemdes/Kel	%	60	65	70		65	65	65		
7.	Posyandu Aktif	%	100	100	100		100	100	100		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya gambaran keberhasilan Dispermades Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2022 tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.a.
Analisis Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Rata-rata jumlah kelompokbinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	6	6	100 %
2	Meningkatkan kulitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	68	68	100 %%
3	Meningkatkan peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	LPM Berprestasi	4,1	4,1	100%
4	Meningkatkan kulitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PKK Aktif	100	100	100 %
5	Meningkatkan peran kelembagaan dan mengembangkan partisipasi serta kewaspadaan masyarakat	Swadaya masyarakat Terhadap program pemberdayaan masyarakat	10	9	100 %
6	Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia yang kreatif dam inovatif di perdesaan dalam pengembangan potensi secara mandiri	Kapasitas aparatur Pemdes/Kel	70	70	100 %
7	Meningkatkan peran kelembagaan dan mengembangkan partisipasi serta kewaspadaan masyarakat	Posyandu Aktif	75	71	94,66%

2. 3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispermades

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta untuk meraih tujuan organisasi, Dispermades Kabupaten Batang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik faktor internal maupun eksternal. Dengan melakukan analisis terhadap lingkungan, dalam hal ini menggunakan analisis SWOT, maka dapat diketahui bahwa faktor lingkungan internal meliputi: *Strenght* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), sedangkan faktor lingkungan eksternal meliputi: *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan/kendala).

Melalui metode analisis SWOT, yakni memperhitungkan *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan/kendala), Dispermades Kabupaten Batang telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*) serta faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal dalam perencanaan strategis yaitu:

Tabel 2.4
Analisis SWOT
Dispermades Kabupaten Batang

<i>Strenght</i> (kekuatan)	<i>Opportunity</i> (peluang)
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten	- Tahapan perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dari mulai tingkat desa (Musrenbangdes)
- Tersedianya anggaran (APBD) untuk pelaksanaan program/kegiatan	- Tersedianya tenaga ahli dan pendamping desa yang kompeten
- Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan	- Tersedianya program aplikasi computer yang dapat mempermudah pelaksanaan tugas (misal: siskeudes)
- Adanya komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas perangkat desa	- Adanya kebijakan Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan program prioritas pembangunan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas perangkat desa
- Adanya pemimpin yang berintegritas dan memahami tugas dan fungsi Dispermades	- Adanya dana bantuan dari pusat dan provinsi (misal: Dana Desa dan DID) untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas perangkat desa
	- Adanya tuntutan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Weakness (kelemahan)	Threat (kendala)
- Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai	- Tahapan perencanaan pembangunan yang kurang sinkron di tingkat desa dan tingkat daerah/kabupaten
- Masih berorientasi pada penyerapan anggaran (SPJ)	- Masih rendahnya kompetensi/ kapasitas/ kualitas SDM (perangkat desa) sehingga kesulitan dalam mengoperasikan program aplikasi computer dan pelaksanaan administrasi
- Belum adanya system informasi (data base)	- Banyaknya sarana dan prasarana desa yang rusak dan kurang memadai
- Kurangnya SDM yang menguasai program aplikasi computer	- Masih tingginya angka kemiskinan di desa
- Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM	- Masih banyaknya penyimpangan yang terjadi di desa karena kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap aturan
	- Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum optimal
	- Kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif (UEP dan BUMDes) di desa

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Selama kurun waktu 2022, faktor lingkungan internal yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Batang adalah adanya komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas perangkat desa, sedangkan faktor lingkungan eksternal yang dominan adalah adanya dana bantuan dari pusat dan provinsi (misal: Dana Desa, DID, Bantuan Keuangan) untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas perangkat desa.

Namun demikian, isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dispermades Kabupaten Batang diantaranya:

- a. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan belum optimal;
- b. Masih rendahnya kompetensi/ kapasitas/ kualitas SDM (perangkat desa);
- c. Kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif (UEP dan BUMDes) di desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Guna menghasilkan suatu rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2021. Telaahan terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2023 untuk mengetahui bahwa dalam rancangan tersebut telah sejalan dan selaras dengan arah dan tujuan pencapaian RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2023 masuk ke dalam Tahapan Pertama (Tahun 2023-2026). Adapun prioritas pembangunan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
Tahun 2017-2022

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Indikator sasaran: smart city/ smart village.
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang secara terpadu	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak. Indikator sasaran: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berprestasi.

Sumber: RPJMD Kab. Batang 2023-2026

Penyusunan RKPD Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Tabel Review rancangan Rencana Kerja Dispermades Kabupaten Batang terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dapat kami sajikan data dalam Tabel 2.4 (TC-31) beriku :

Tabel 2.4 (TC-31)
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Kabupaten Batang

Nama Perangkat: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.544.040.200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.544.040.200	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Batang	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan cepat	12.bulan	367.534.850	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Batang	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan cepat	12.0 bulan	367.534.850	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Batang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.000.000	<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Batang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Batang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Batang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Batang	Tertib administrasi dan pelaporan keuangan	12.bulan	2.490.390.264	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Batang	Tertib administrasi dan pelaporan keuangan	12.0 bulan	2.576.895.710	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21Org/. Bln	2.428.890.264	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang	Gaji dan Tunjangan ASN	12.0 Bulan	2.515.353.160	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12. Dokumen	61.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Batang	Tertib laporan pertanggungjawaban anggaran dinas	12.0 Bulan	61.542.550	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Batang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Batang	Terwujudnya Tertib Pegawai yang sesuai dengan tupoksinya	21 Orang	25.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Kab. Batang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Kab. Batang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	25.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Batang	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	12.0 bulan	67.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Batang	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	12.0 bulan	86.749.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Batang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 Paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Batang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 Paket	2.473.700	
	Penyediaan Bahan Logistik	Kab. Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	10 Paket	7.000.000	Penyediaan Bahan Logistik	Kab. Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	10 Paket	5.634.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Batang	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	5 Paket	9.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Batang	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	5 Paket	9.641.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Batang	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	3.600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Batang	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	3.600,000	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	45.000.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	65.400.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batang	Cakupan layanan operasional kantor	12.bulan	121.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kantor	Kab. Batang	Cakupan layanan operasional kantor	12.bulan	119.858.300	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan surat menyurat terlaksana	1 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan surat menyurat terlaksana	1 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	75.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	25 Unit	89.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Batang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	25 Unit	89.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Batang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tugas	25 Unit	65.000..000	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Lapangan	Kab. Batang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tugas	25 Unit	65.000..000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	4.000.000	
	Pemerlihaaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	3. unit	20.000.000	PemerlihaaraanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Batang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	3. unit	20.000.000	
2.	PROGRAM PENATAN DESA	Kab. Batang	Persentase budaya desa yang dilestarikan	239 Desa	35.000.000	PROGRAM PENATAN DESA	Kab. Batang	Persentase budaya desa yang dilestarikan	239 Desa	35.000.000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Batang	jumlah adat dan budaya desa yang dibina	1 Laporan	35.000.000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Batang	jumlah adat dan budaya desa yang dibina	1 Laporan	35.000.000	
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa	Kab. Batang	Laporan Jumlah Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	1 Laporan	35.000.000	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa	Kab. Batang	Laporan Jumlah Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	1 Laporan	35.000.000	

	Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota			AdatKewenangan Kabupaten/Kota		dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Batang	persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraruran yang berlaku	239 desa	7.090.440.520	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Batang	persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraruran yang berlaku	239 Desa	7.090.440.520	
	Pembinaan dan Pengawasa Penyelenggaraan Admiinistrasi Pemerintah Desa	Kab. Batang	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	50 desa		Pembinaan dan Pengawasa Penyelenggaraan Admiinistrasi Pemerintah Desa	Kab. Batang	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	50 Desa		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Batang	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	65.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Batang	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	65.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bintek Pengelolaan Keuangan Desa Ansuransi Perangkat Desa Tenaga Administrasi	Kab. Batang	Jumlah Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen	3.490.440.500 108.855.700 3.356.720.800 24.864.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bintek Pengelolaan Keuangan Desa Ansuransi Perangkat Desa Tenaga Administrasi	Kab. Batang	Jumlah Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen	108.855.700 3.356.720.800 24.864.000	
	Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	35.000.000	Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	35.000.000	
	Penyelenggaran Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Penyeleng garaan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan	40.000.000	Penyelenggaran Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Penyeleng garaan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan	40.000.000	
	Fasilitasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	35.000.000	Fasilitasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	35.000.000	

	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	239 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	239 Dokumen	20.000.000	
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Penugasan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	6 Dokumen	1.780.000.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Penugasan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	6 Dokumen	1.780.000.000	
	Pendampingan Dana Desa (DD)		Terciptanya ketertiban pelaksanaan DD		94.017.800	Pendampingan Dana Desa (DD)		Terciptanya ketertiban pelaksanaan DD		94.017.800	
	Pendampingan BHPD				22.540.700	Pendampingan BHPD				22.540.700	
	Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus				62.301.500	Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa				62.301.500	
	Bantuan Reward PBB				1.500.000.000	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa				1.500.000.000	
	Jasa Tenaga Operator Komputer				24.000.000	Jasa Tenaga Operator Komputer				24.000.000	
	Ansuransi Non ASN				2.220.000					2.220.000	
	Bantuan Keuangan Usaha Tani				100.000.000					100.000.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa Dan Kelurahan	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa Dan Kelurahan	2 Dokumen	35.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa Dan Kelurahan	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa Dan Kelurahan	2 Dokumen	35.000.000	
4.	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Batang		25 desa	3.050.500.000	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Batang	jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan asetnya	25. desa	3.050.500.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang	Kab. Batang	Jumlah LKD yang aktif dalam pemberdayaan desa	25 des	3.050.500.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang	Kab. Batang	Jumlah LKD yang aktif dalam pemberdayaan desa	25. desa	3.050.500.000	

	Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayaagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DEsa /Kelurahan9RT,RW,PKK, Posyandu,LPK dan KarangTaruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan Dan MAsyarakat Hukum Adat	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan RT,RW,PKK, Posyandu,LPK dan KarangTaruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan Dan MAsyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	560.500.000	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayaagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DEsa /Kelurahan9RT,RW,PKK, Posyandu,LPK dan KarangTaruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan Dan MAsyarakat Hukum Adat	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayaagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan RT,RW,PKK, Posyandu,LPK dan KarangTaruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan Dan MAsyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	560.500.000	
	Fasilitasi PMT-AS				34.286.350	Fasilitasi PMT-AS				34.286.350	
	Fasilitasi Posyandu				74.544.050	Fasilitasi Posyandu				74.544.050	
	Bansos PMT-Posyandu				175.500.000	Bansos PMT-Posyandu				175.500.000	
	Bansos PMT-AS				189.150.000	Bansos PMT-AS				189.150.000	
	Jasa tenaga administrasi			12 bulan	24.864 .000	Jasa tenaga administrasi	12 bulan			24.864 .000	
	Jasa Tenaga Kebersihan			12 bulan	21.600.000	Jasa Tenaga Kebersihan	12 bulan			21.600.000	
	Ansuransi Non ASN			12 bulan	5.592.000	Ansuransi Non ASN	12 bulan			5.592.000	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	Kab. Batang	Jumlah Penyediaan Sarana & Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	4 Unit	150.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	Kab. Batang	Jumlah Penyediaan Sarana & Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,	4 Unit	150.000.000	

	RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Pengembangan SID		Jumlah Desa yang SID nya Berkembang		64.334.400	Pengembangan SID		Jumlah Desa yang SID nya Berkembang		64.334.400	
	Pelatihan KPM		Jumlah Kader Yg mendpata Pelatihan KPM		60.038.400	Pelatihan KPM		Jumlah Kader Yg mendpata Pelatihan KPM		60.038.400	
	BBGRM (lomba Vidio)				25.627.200	BBGRM (Lomba Vidio)				25.627.200	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Batang	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan UKM dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	4 Dokumen	1.825.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa TMMD, UPK	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan UKM dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	4 Dokumen	1.825.000.000	
	Fasilitasi dan Pembinaan UPK eks PNPM		Jumlah UPK eks PNPM yang dapat Pembinaan		24.866.600	Fasilitasi dan Pembinaan UPK eks PNPM		Jumlah UPK eks PNPM yang dapat Pembinaan		24.866.600	
	Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI		Jumlah Desa yg mendapat Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI		39.014.000	Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI		Jumlah Desa yg mendapat Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI		39.014.000	
	Bankeu TMMD Kabupaten		Jumlah Desa yang mendapatkan Bankeu TMMD Kab.		1.721.350.000	Bankeu TMMD Kabupaten		Jumlah Desa yang mendapatkan Bankeu TMMD Kab.		1.721.350.000	
	Bankeu TMMD Propinsi		Jumlah Bankeu TMMD Propinsi		750.000.000	Bankeu TMMD Propinsi		Jumlah Bankeu TMMD Propinsi		750.000.000	
	Monitoring Pasar Desa				17.750.000	Monitoring Pasar Desa				17.750.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	115.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Batang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	115.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Provinsi		Jumlah desa Yg mendapat fasilitasi bantuan Provinsi		47.832.500	Fasilitasi Bantuan Provinsi		Jumlah desa Yg mendapat fasilitasi bantuan Provinsi		47.832.500	
	Fasilitasi Pamsimas Pasca Kostruksi		Jumlah Desa Yang Mendapat Fasilitasi		6.876.200	Fasilitasi Pamsimas Pasca Kostruksi		Jumlah Desa Yang Mendapat Fasilitasi		6.876.200	

			Pamsimas Pasca Kostruksi					Pamsimas Pasca Kostruksi			
	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan Pelatihan TTG III		Jumlah Desa yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan		31.822.300	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan Pelatihan TTG III		Jumlah Desa yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan		31.822.300	
	Gelar TTG		Jumlah Desa yang mendapat Gelar Teknologi Tepat Guna		28.528.000	Gelar TTG		Jumlah Desa yang mendapat Gelar Teknologi Tepat Guna		28.528.000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dlm Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Batang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dlm Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 Dokumen	400.000.000	
	Sekretariat	Kab. Batang			95.678.700	Sekretariat	Kab. Batang			95.678.700	
	Bimbingan dan Monitoring Kegiatan 10 Program Pokok PKK	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang Mendapat Bimbingan dan Monitoring Kegiatan 10 Program Pokok PKK	30 Desa	20.605.500	Bimbingan dan Monitoring Kegiatan 10 Program Pokok PKK	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang Mendapat Bimbingan dan Monitoring Kegiatan 10 Program Pokok PKK	30 Desa	20.605.500	
	Lomba Administrasi TP. PKK Kecamatan dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	Kab. Batang	Jumlah PKK Desa yang Tertib Administrasi Dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	15 Kec.	29.415.000	Lomba Administrasi TP. PKK Kecamatan dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	Kab. Batang	Jumlah PKK Desa yang Tertib Administrasi Dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	15 Kec.	29.415.000	
	Kegiatan Rapat konsultasi Tim PKK	Kab. Batang			24.351.000		Kab. Batang			24.351.000	
	Stand PKK Pada Batang Expo Tahun 2023	Kab. Batang			5.000.000	Stand PKK Pada Batang Expo Tahun 2023	Kab. Batang			5.000.000	
	Pokja I Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Pengajian dan Kader Lansia BKL di Desa	Kab. Batang	Jumlah Desa Yg mendapat Fasilitasi Sekretariat TP PKK Kab. Batang	30 Desa	29.048.600	Pembinaan Kelompok Pengajian, Lansia dan Kader BKL	Kab. Batang	Jumlah Desa Yg mendapat Fasilitasi Sekretariat TP PKK Kab. Batang		29.048.600	

	Binaan TP PKK Kab. Batang										
	Pokja I Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Pola Anak Asuh dan Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Anak dan Pencegahan Stunting	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang Mendapat Workshop Peningkatan Kapasitas Kader Pola Anak Asuh dan Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Anak dan Pencegahan Stunting		25.951.400	Pokja I Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Pola Anak Asuh dan Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Anak dan Pencegahan Stunting	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang Mendapat Workshop Peningkatan Kapasitas Kader Pola Anak Asuh dan Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Anak dan Pencegahan Stunting		25.951.400	
	Pokja II Pembinaan Program Gelari Pelangi peningkatan dan Ekonomi bagi Kader PKK Desa Binaan	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan		21.999.900	Pokja II Pembinaan Program Gelari Pelangi peningkatan dan Ekonomi bagi Kader PKK Desa Binaan	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan		21.999.900	
	Pokja II Workshop Peningkatan Budaya Lestari Pendidikan Karakter Gemar Membaca	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang Mendapat Workshop Pendidikan Keluarga Pencegah Stunting		15.000.000	Pokja II Workshop Pendidikan Keluarga Pencegah Stunting	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang Mendapat Workshop Pendidikan Keluarga Pencegah Stunting		15.000.000	
	Kewirausahaan Penguatan Ekonomi Keluarga Cegah Stunting Melalui UP2K PKK	Kab. Batang	Jumlah Desa yang mendapat pendidikan Kewirausahaan Penguatan Ekonomi Keluarga Cegah Stunting Melalui UP2K PKK		18.000.000	Kewirausahaan Penguatan Ekonomi Keluarga Cegah Stunting Melalui UP2K PKK	Kab. Batang	Jumlah Desa yang mendapat pendidikan Kewirausahaan Penguatan Ekonomi Keluarga Cegah Stunting Melalui UP2K PKK		18.000.000	
	Pkja II Fasilitasi RBA	Kab. Batang			5.000.000					5.000.000	
	Pokja III Workshop B2SA untuk Mencegah Stunting	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang mengikuti Workshop	30 Desa	24.576.200	Pokja III Cegah Stunting dengan Pola Asuh 100 Hari Pertama Kehidupan	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang mengikuti Workshop		24.576.200	
	Pokja III Pembinaan Hatinya PKK untuk Menanggulangi Stunting	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Hatinya PKK untuk Menanggulangi Stunting		30.373.600	Pokja III Pembinaan Hatinya PKK untuk Menanggulangi Stunting	Kab. Batang	Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Hatinya PKK untuk Menanggulangi Stunting		30.373.600	
	Pokja IV Workshop Pengukuran Antropometri Bagi kades Posy dalam	Kab. Batang	Jumlah Kades Desa yang mendapat Workshop		18.146.000	Pokja IV Workshop Pengukuran Antropometri Bagi kades Posy dalam	Kab. Batang	Jumlah Kades Desa yang mendapat Workshop		18.146.000	

	Rangka Deteksi Pencegahan Stunting		Antropometri deteksi Stunting			Rangka Deteksi Pencegahan Stunting		Antropometri deteksi Stunting			
	Pokja IV Lomba Pelaksanaan Posy. Terbaik dalam Rangka Pencegahan stunting	Kab. Batang	Jumlah Posyandu Terbaik Pencegahan Stunting		22.801.750	Pokja IV Lomba Pelaksanaan Posy. Terbaik dalam Rangka Pencegahan stunting	Kab. Batang	Jumlah Posyandu Terbaik Pencegahan Stunting		22.801.750	
	Pokja IV Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Prima Dalam rangka Pencegahan Stunting	Kab. Batang	Jumlah desa Prima		14.052.250	Pokja IV Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Prima Dalam rangka Pencegahan Stunting	Kab. Batang	Jumlah desa Prima		14.052.250	
			TOTAL PAGU INDIKATIF		10.544.040.200			TOTAL PAGU INDIKATIF		10.544.040.200	

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan melalui identifikasi program atau kegiatan prioritas yang tercantum didalam rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan . Hasil reviu dapat dilihat pada tabel 2.4 dan dapat dianalisis sebagai berikut :

Terdapat perubahan pagu indikatif dibandingkan dengan Pagu APBD Tahun 2023 dari beberapa sub kegiatan sesuai evalui pelaksanaan sub kegiatan tahun sebelumnya dan penyusunan terhadap Standarisasi harga Satuan Tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dispermades sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dituntut untuk meningkatkan peran kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan juga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.

Proses perencanaan daerah dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenang kecamatan, forum OPD dan musrenbang kabupaten dimana sudah menakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Program dan kegiatan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagia dari pendekatan peencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangklat Daerah.

Pada tahun 2023 tidak ada Usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari Para Pemangku Kepentingan, adapun mekanisme pengusulannya dari Perangkat Daerah Dispermades Kabupaten Batang karena ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dispermades.

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dispermades Kab. Batang
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERMADES

3.1 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:

- 1. Pencapaian visis dan misis kepala daerah
- 2. Pencapaian SDGs
- 3. Pengentasan kemiskinan
- 4. Pencapaian NSPK dan SPM
- 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Penetapan Anggaran Tahun 2023 merencanakan 4 program yang terdiri : 9 kegiatan 29 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 program, 5 kegiatan, dan 9 sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten serta 3 program, 3 kegiatan, dan 14 sub kegiatan yang merupakan urusan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan DispermaDES Kabupaten Batang

Tahun Anggaran 2023

Program		Kegiatan			Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	a.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	a.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
				b.	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4.	Administrasi umum perangkat daerah	a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				b.	Penyediaan bahan logistic kantor
				c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

				d.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				e.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
			5.	a.	Penyediaan jasa surat menyurat
				b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
				c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
			6.	a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				b.	Pengadaan Mebel
				c.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
				d.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2.	Program Penataan Desa	1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	a.	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	a.	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
				b.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
				c.	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa
				d.	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa
				e.	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
				f.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				g.	Pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa
				h.	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	1.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang	a.	Fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga

	Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota		kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
				b.	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
				c.	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
				d.	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
				e.	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Sesuai dengan RKPD Kabupaten Batang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang merencanakan total kebutuhan dana sebesar Rp37.935.693.610, - (Tiga Puluh Sembilan Milyard Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Putuh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rincian RKPD Final Dispermades Kab. Batang
Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran
1.	Belanja Urusan Non Bidang	2.903.628.110
2.	Belanja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.032.065.500
	Total Pagu Anggaran	37.935.693.610

Sedangkan rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah penetapan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Dispermades Kabupaten Batang sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dispermades Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2024

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Indikator		PAGU INDIKATIF				Asal Usulan
				APBD	APBD Prov	APBN	Sub Total	
1	2	3		4	5	6	7 = 4+5+6	8
2.13.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			10.544.040.200	0.00	0.00	10.544.040.200	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			367.534.850	0.00	0.00	367.534.850	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan cepat	12.0 bulan	367.534.850	0.00	0,00	367.534.850	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	4 Laporan	4.000.000	0.00	0.00	4.000.000	Usulan OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	4.000.000	0.00	0.00	4.000.000	Usulan OPD
202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi dan pelaporan keuangan	12 bulan	2.490.390.264	0.00	0.00	2.490.390.264	Usulan OPD
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.428.890.264	0.00	0.00	2.428.890.264	Usulan OPD
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertib laporan pertanggungjawaban anggaran dinas	12.Bulan	61.500.000	0.00	0.00	61.500.000	Usulan OPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	21 ASN	25.000.000	0.00	0.00	25.000.000	Usulan OPD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Terpenuhinya ASN sesuai dengan Tugas dan Fungsinya	21 ASN	25.000.000	0.00	0.00	25.000.000	Usulan OPD

203	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran	12. bulan	67.600.000	0.00	0.00	67.600.000	Usulan OPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12. Bulan	2.500.000	0.00	0.00	2.500.000	Usulan OPD
	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Bahan Logistik	12. Bulan	7.000.000	0.00	0.00	7.000.000	Usulan OPD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Tahun	9,500.000	0.00	0.00	9,500.000	Usulan OPD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran, majalah)	3.0 Exemplar	3.600,000	0.00	0.00	3.600,000	Usulan OPD
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terfasilitasinya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12.0 Bulan	45.000.000	0.00	0.00	45.000.000	Usulan OPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan operasional kantor	12.0 bulan	121.000.000	0.00	0.00	121.000.000	Usulan OPD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat terlaksana	12.0 bulan	1.000.000	0.00	0.00	1.000.000	Usulan OPD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.0 Bulan	45.000.000	0.00	0.00	45.000.000	Usulan OPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	2 Unit	75.000.000	0.00	0.00	75.000.000	Usulan OPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	25.0 Unit	89.000.000	0.00	0.00	89.000.000	Usulan OPD
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Lapangan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	25 Unit	65.000.000.	0.00	0.00	65.000.000.	Usulan OPD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Tahun	4.000.000	0.00	0.00	4.000.000	Usulan OPD
	Pemeriharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.0 unit	20.000.000	0.00	0.00	20.000.000	Usulan OPD
	PROGRAM PENATAN DESA	Persentase budaya desa yang dilestarikan	25	35.000.000	0.00	0.00	35.000.000	Usulan OPD
	Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah adat dan budaya desa yang dibina	25	35.000.000	0.00	0.00	35.000.000	Usulan OPD

	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa AdatKewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kelompok yang dilatih dan dibina	25	35.000.000	0.00	0.00	35.000.000	Usulan OPD
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku	239 desa	7.090.440.520	0.00	0.00	7.090.440.520	Usulan OPD
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	239 desa	7.090.440.520	0.00	0.00	7.090.440.520	Usulan OPD
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelengga raan Administrasi Pemerintah Desa	239 desa	65.000.000	0.00	0.00	65.000.000	Usulan OPD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	239 desa	3.490.440.500	0.00	0.00	3.490.440.500	Usulan OPD
	Bintek Pengelolaan Keu Desa			108.855.700			108.855.700	Usulan OPD
	Ansuransi Perangkat Desa			3.356.720.800			3.356.720.800	Usulan OPD
	Tenaga Administrasi			24.864.000			24.864.000	Usulan OPD
	Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah BUMdes dan Lembaga Kerjasama yang mendapat pembinaan	239 desa	35.000.000	0.00	0.00	35.000.000	Usulan OPD
	Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	239 desa	40.000.000	0.00	0.00	40.000.000	Usulan OPD
	Fasilitasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	239 desa	35.000.000	0.00	0.00	35.000.000	Usulan OPD
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Aset Desa	239 desa	20.000.000	0.00	0.00	20.000.000	Usulan OPD
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa.	Terlaksannya Fasilitasi Pengembangan UKM dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	239 desa	1.780.000.000	0.00	0.00	1.780.000.000	Usulan OPD
	Pendampingan DD (Dana Desa)			94.017.800			94.017.800	
	Pendampingan BHPD			22.540.700			22.540.700	
	Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus			62.301.500			62.301.500	
	Bantuan Reward PBB			1.500.000.000			1.500.000.000	

	Jasa Tenaga Operator Komputer			24.000.000			24.000.000	
	Ansuransi Non ASN			2.220.000			2.220.000	
	Bantuan Keuangan Usaha Tani			100.000.000			100.000.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang tertib	239 desa	35.000.000	0.00	0.00	35.000.000	Usulan OPD
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terpenuhinya kelancaran Pelaksanaan Pilkades		30.474.800	0.00	0.00	30.474.800	Usulan OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan asetnya	25 desa	3.050.500.000	0.00	0.00	3.050.500.000	Usulan OPD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKD yang aktif dalam pemberdayaan desa	25 des	3.050.500.000	0.00	0.00	3.050.500.000	Usulan OPD
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapat bantuan sarana prasarana	239 Desa	560.500.000	0.00	0.00	560.500.000	Usulan OPD
	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayaagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DEsa /Kelurahan9RT,RW,PKK,Posyandu,LPK dan KarangTaruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan Dan MAsyarakat Hukum Adat	Jumlah LKD yang dibina	239 Desa	511.975.850	0.00	0.00	511.975.850	Usulan OPD

	Fasilitasi PMT-AS	Terpenuhinya Anak yang mendapat PMTAS	6000 anak	34.286.350	0.00	0.00	34.286.350	Usulan OPD
	Fasilitasi Posyandu	Terpenuhinya Anak yang mendapat Posyandu	15 Posyandu	74.544.050	0.00	0.00	74.544.050	Usulan OPD
	Bansos PMT-Posyandu	Prosentase jumlah kec. Yang mendapat bantuan bansos PMT-Posyandu	15 Kcamatan	175.500.000	0.00	0.00	175.500.000	Usulan OPD
	Bansos PMT-AS	Prosentase jumlah kec. Yang mendapat bantuan bansos PMT-AS		189.150.000	0.00	0.00	189.150.000	Usulan OPD
	Jasa tenaga administrasi	Tertibnya Administrasi	12 bln	24.864.000	0.00	0.00	24.864.000	Usulan OPD
	Jasa Tenaga Kebersihan	Terpenuhinya Kebersihan Kantor	12 bln	54.392.850	0.00	0.00	54.392.850	Usulan OPD
	Ansuransi Non ASN	Terpenuhinya Ansuransi non ASN	12 bulan	5.592.000	0.00	0.00	5.592.000	Usulan OPD
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Penyediaan Sarana & Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4	150.000.000			150.000.000	
	Pengembangan SID	Jumlah Desa yang SID nya Berkembang		64.334.400			64.334.400	
	Pelatihan KPM	Jumlah Kader Yg mendpata Pelatihan KPM		60.038.400			60.038.400	
	BBGRM (lomba Vidio)			25.627.200			25.627.200	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan UKM dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli		1.825.000.000	0.00	0.00	1.825.000.000	Usulan OPD
	Fasilitasi dan Pembinaan UPK eks PNPM	Jumlah UPK eks PNPM yang dapat Pembinaan		24.866.600	0.00	0.00	24.866.600	Usulan OPD
	Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI	Jumlah Desa yg mendapat Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI	3 Desa	39.014.000	0.00	0.00	39.014.000	Usulan OPD

	Bankeu TMMD Kabupaten	Jumlah Desa yang mendapatkan Bankeu TMMD Kab.	3 Desa	1.721.350.000	0.00	0.00	1.721.350.000	Usulan OPD
	Bankeu TMMD Propinsi	Jumlah Bankeu TMMD Propinsi	3 Desa		750.000.000	0.00		Usulan OPD
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terfasilitasi Jumlah desa yang mendapat Pemanfaatan bantuan TTG	15 Kec	115.000.000	0.00	0.00	115.000.000	Usulan OPD
	Fasilitasi Bantuan Provinsi	Jumlah desa Yg mendapat fasilitasi bantuan Provinsi	15 Kec	47.832.500	0.00	0.00	47.832.500	Usulan OPD
	Fasilitasi Pamsimas Pasca Kostruksi	Jumlah Desa Yang Mendapat Fasilitasi Pamsimas Pasca Kostruksi	15 Kec	6.876.200	0.00	0.00	6.876.200	Usulan OPD
	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan	Jumlah Desa yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan	15 Kec	31.822.300	0.00	0.00	31.822.300	Usulan OPD
	Gelar TTG	Jumlah Desa yang mendapat Gelar Teknologi Tepat Guna	15 Kec	28.528.000	0.00	0.00	28.528.000	Usulan OPD
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasi nya jumlah PKK desa yang aktif	239 desa	400.000.000	0.00	0.00	400.000.000	Usulan OPD
TOTAL PAGU INDIKATIF				9.794.040.200	750.000000	0,00	10.544.040.200	

Dari table 3.3 (T-C. 33) diatas dapat diuraikan hal hal sebagai berikut :

1. Rumusan nomenklatur dan jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan rancangan awal RKPD.
2. Terdapat perubahan pagu indikatif dibandingkan dengan pagu APBD Tahun 2023 dari beberapa sub kegiatan, hal ini menyesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan tahun sebelumnya dan perhitungan ulang perencanaan sehingga deiharapkan lebih efektif dan efesiens sesuai kebutuhan pencapaian target kinerja

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- c. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 24.

Berdasarkan analisa program dan kebutuhan anggaran, Rencana Kerja (Renja) Dispermades Kabupaten Batang tahun 2024 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 8.944.040.520 yang terinci dalam 4 Program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Harapannya, Rencana Kerja (Renja) ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang tahun 2023-2026 dan sejalan dengan arah implementasi program unggulan Gubernur Jawa Tengah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi dan memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan, dan terintegrasi.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Batang, Juni 2023

KA. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATANG


Drs. RUSMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730720 199303 1 005